



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Persidangan ke-	: <b>IV (Empat)</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: <b>Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 28 Maret 2023.</b>
Pukul	: <b>12.30 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI;</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Pendalaman Program dan Anggaran TA 2022</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 28 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Kemenparekraf RI/Sestama Baparekraf RI/Pit Inspektur Utama, NW Giri Adnyani</li><li>2. Deputi Bidang Kebijakan Strategis (D1), Nia Niscaya</li><li>3. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (D2), Martini M. Paham</li><li>4. Plt. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur, F.X Teguh</li><li>5. Deputi Bidang Industri dan Infrastruktur (D4), Rizki Handayani</li><li>6. Deputi Bidang Pemasaran (D5), Ni Made Ayu Marthini</li><li>7. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (D6), Vinsensius Jemadu</li><li>8. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif (D7), M. Neil El Himan</li><li>9. Bersama jajaran lain</li></ol>

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.33 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pejabat Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan penjelasan masing-masing pejabat eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI, terdapat beberapa poin utama yang disampaikan, antara lain:
  - a. Realisasi anggaran per 24 Maret 2023 masing-masing unit kerja sebagai berikut:

<b>N O</b>	<b>UNIT UTAMA</b>	<b>Realisasi Anggaran (%)</b>
1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	16,56 %
2	Inspektorat Utama	20,00 %
3	Deputi Bidang Kebijakan Strategis	20,00 %
4	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	19,92 %
5	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	16,59 %
6	Deputi Bidang Industri dan Investasi	17,32 %
7	Deputi Bidang Pemasaran	8,03 %
8	Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan ( <i>Events</i> )	19,62 %
9	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	10,91 %
10	Badan Pelaksana Otorita	20,31%
11	UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	11,38 %

- b. Sekretaris Kemenparekraf/Sestama Baparekraf akan melakukan evaluasi realisasi penyerapan anggaran dengan melakukan monitoring secara lebih komprehensif di seluruh Satuan Kerja.
    - c. Deputi 1 telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan peningkatan *Travel and Tourism Development Index* dan Evaluasi Penyusunan RPerpres tentang RIDPN Manado-Likupang Tahun 2022-2044 dan RPerpres tentang RIDPN Bangka Belitung Tahun 2022-2044, serta penyusunan RPerpres tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.
    - d. Deputi 2 antara lain menyampaikan bahwa terdapat 2 direktorat yang daya serap anggarannya dibawah 10 %.
    - e. Deputi 3 antara lain menyampaikan evaluasi mengenai beberapa perubahan dari K/L dan daerah terkait dukungan untuk parekraf di daerah sesuai dengan KPI masing-masing
    - f. Deputi 4 antara lain menyampaikan evaluasi dari masing-masing direktorat seperti pelaksanaan Bimtek, fasilitasi pembiayaan UMKM, dan pembiayaan homestay di desa wisata.

- g. Deputi 5 antara lain menyampaikan evaluasi triwula I dengan melakukan optimalisasi anggaran sesuai dengan program dan kegiatan prioritas serta meningkatkan kolaborasi pentahelix.
  - h. Deputi 6 antara lain menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan MICE dan Event.
  - i. Deputi 7 antara lain menyampaikan evaluasi terhadap kegiatan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI), Santri Digitalpreneur Indonesia (SDPI), dan Festival Film Bulanan (FFB).
2. Masing-masing unit kerja menyampaikan terdapat beberapa isu terkini bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang perlu mendapat respon dan solusi atas permasalahannya.
  3. Terhadap paparan dan penjelasan eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
    - a. Komisi X DPR RI mendorong agar capaian program Kemenparekraf RI/Baparekraf RI tidak hanya berorientasi pada hasil realisasi serapan anggaran, namun juga memperhatikan efektivitas dan harus memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pariwisata serta partisipasi masyarakat, termasuk kelompok usia millennial.
    - b. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI/Baparekraf RI untuk menyusun regulasi yang mampu membangun ekosistem pengelolaan pariwisata berbasis kerjasama antar daerah.
    - c. Dalam penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Komisi X DPR RI menekankan agar dalam penyusunannya dapat mengakomodir berbagai regulasi terkait pariwisata sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan.
    - d. Mendorong masing-masing Deputi untuk terus meningkatkan daya serap anggarannya secara signifikan pada triwulan selanjutnya dengan tetap merujuk Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran Program dari masing-masing unit kerja.
    - e. Komisi X DPR RI mendorong setiap Deputi (Eselon I) Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan program-program yang menjadi program prioritas dan beririsan agar ditujukan untuk mempercepat upaya pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid-19, antisipasi dampak bencana alam dan non alam di kawasan destinasi, dan pariwisata berkelanjutan.
    - f. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI/Baparekraf RI dalam upaya penertiban dan penegakan hukum untuk turis "nakal" dengan mendahulukan upaya preventif dan persuasif yang tidak mempengaruhi citra positif pariwisata Indonesia serta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
  4. Bahan paparan masing-masing pejabat eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI menjadi dokumen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini (28 Maret 2023)
  5. Komisi X DPR RI mengharapkan masing-masing unit utama/eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi X DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal **7 April 2023**.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup tanggal 28 Maret 2023 pukul 16.02 WIB

**Sekretaris Kemenparekraf RI/  
Sekretaris Utama Baparekraf RI**



**Ni Wayan Giri Adnyani**

**Ketua Rapat,**



**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM**